

**Manajemen Perubahan Kurikulum Dari K-13 ke Kurikulum Merdeka di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli
Serdang**

Neliwati, Rabbirham, Siti Aisyah, Raudatun Annisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

neliwati@uinsu.ac.id, rabbirham0332234003@uinsu.ac.id,

siti0332234028@uinsu.ac.id, raudatun0332234003@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the curriculum change management from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum at the Private Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, Beringin District, Deli Serdang. The research method used is qualitative with a case study approach. The results showed that the curriculum change management process at the Private Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah includes planning, organizing, implementing, and evaluating. The conclusion of this research is that the curriculum change management from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum at the Private Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, Beringin District, Deli Serdang has been implemented well.

Keywords: Change Management, Curriculum, Madrasah Ibtidaiyah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen perubahan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli Serdang telah dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Manajemen Perubahan, Kurikulum, Madrasah Ibtidaiyah

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pendidikan, baik dalam ilmu umum, agama, maupun lainnya. Pendidikan bertujuan mencerdaskan generasi bangsa dan mencakup pendidikan sosial, moral, akhlak, serta keterampilan. Pendidikan merupakan program yang penting bagi manusia untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pemikiran yang relevan untuk kehidupan di dunia maupun akhirat. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah lembaga yang berisi kegiatan untuk

menuntun peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mereka guna mencapai kesejahteraan dan keselamatan sebagai individu dan anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan program pendidikan, peserta didik dituntun untuk mengembangkan dan menyempurnakan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Dengan meningkatnya kemampuan setiap individu, akan terjadi perkembangan dalam keterampilan dan kualitas daya pikir peserta didik.

Pelaksanaan program pendidikan, diperlukan sebuah kurikulum. Kurikulum pendidikan adalah pedoman yang digunakan dalam program pendidikan karena berisi panduan atau arahan dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik, yang dikenal sebagai proses pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum sering disebut sebagai inti dari program pendidikan. Kurikulum pendidikan adalah program yang berisi rencana dan aturan mengenai bahan ajar, tujuan pembelajaran, dan isi pembelajaran yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan. Jika kurikulum diterapkan dengan baik dalam program pembelajaran, maka tujuan dan mutu pembelajaran akan tercapai dengan baik.

Pesatnya era modern membuat ilmu pengetahuan umum peserta didik perlu diseimbangkan dengan ilmu pengetahuan Islam. Salah satu lembaga pendidikan yang memiliki nuansa pengetahuan agama Islam adalah Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah memainkan peran penting dalam pendidikan di era modern saat ini karena perkembangan zaman yang pesat, dipengaruhi budaya barat, membawa dampak negatif bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan menekankan ilmu pengetahuan Islam dalam proses pembelajarannya, Madrasah Ibtidaiyah membantu peserta didik membentengi diri dengan moral dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam.

Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang dalam pembelajarannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam melalui penambahan mata pelajaran keislaman, baik secara terpisah maupun terintegrasi. Lembaga pendidikan Islam bertujuan menciptakan individu yang baik, berkualitas, dan bermoral sesuai dengan syariat Islam melalui pendidikan Islam. Namun, ini tidak berarti bahwa lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak mengajarkan mata pelajaran umum lainnya, yang merupakan mata pelajaran wajib dari kurikulum pendidikan nasional, seperti Matematika, Bahasa, Seni, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Madrasah Ibtidaiyah menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan agama untuk memastikan peserta didik tidak hanya fokus pada pendidikan Islam, tetapi juga dapat menguasai dan menambah wawasan dalam pendidikan sosial. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman. Selain itu, Madrasah Ibtidaiyah juga menawarkan ekstrakurikuler untuk mengembangkan keterampilan, minat, dan bakat peserta didik, yang juga mencantumkan nilai-nilai Islam yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Suatu kurikulum pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa disertai dengan manajemen yang baik. Manajemen meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi (*controlling*)

untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum juga harus memahami dan menguasai ilmu manajemen, baik dalam perencanaan, pengelolaan program pendidikan, maupun penerapan kurikulum itu sendiri. Berdasarkan penelitian pada tanggal 9 Mei 2024, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli Serdang telah mengadopsi Kurikulum Merdeka sebagai pengganti Kurikulum 2013. Penerapan kurikulum baru ini masih dalam tahap percobaan. Oleh karena itu, jika sebuah institusi pendidikan menerapkan perubahan kurikulum seperti ini, maka institusi tersebut harus mampu mengintegrasikan manajemen dari masing-masing kurikulum, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi kurikulum.

Kurikulum pendidikan harus didasarkan pada manajemen pendidikan. Salah satu aspek penting dari manajemen pendidikan adalah manajemen kurikulum, karena manajemen merupakan syarat penting bagi keberlangsungan lembaga pendidikan. Dengan manajemen yang baik, perencanaan hingga evaluasi pembelajaran dapat berjalan optimal, memastikan bahan ajar, sumber belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum lainnya terlaksana dengan baik. Perbedaan kurikulum memerlukan manajemen kurikulum yang berbeda pula. Tanpa manajemen yang tepat, sulit mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Manajemen dalam kurikulum pendidikan sangat penting untuk keberhasilan perubahan kurikulum. Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli Serdang, yang masih dalam tahap percobaan perubahan kurikulum k-13 ke kurikulum merdeka, diperlukan untuk mengidentifikasi persiapan matang terkait perubahan kurikulum, dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini akan membantu meminimalisir kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan. Terlebih lagi, kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum k-13, kurikulum Merdeka yang relatif baru, yang dipadukan dengan pendidikan madrasah ibtidaiyah.

KAJIAN LITARATUR

Kurikulum

Secara akademis, kurikulum mencakup empat komponen utama:

1. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
2. Pengetahuan, ilmu, data, aktivitas, dan pengalaman yang beragam.
3. Metode dan cara pengajaran serta bimbingan yang digunakan untuk mendorong siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Metode dan cara penilaian yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum (Langgulang, 2003:176).

Terkait dengan perubahan kurikulum, Soetopo dan Soemanto (1991:38) menyatakan bahwa kurikulum dianggap mengalami perubahan jika terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu,

akibat adanya usaha yang disengaja. Menurut Nasution (2009:252), perubahan kurikulum mencakup perubahan tujuan maupun alat atau metode untuk mencapai tujuan tersebut. Mengubah kurikulum sering kali berarti juga mengubah individu-individu yang terlibat, seperti guru, pembina pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial atau *social change*, dan sering kali disebut sebagai pembaruan atau inovasi kurikulum.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Perubahan ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, kepala sekolah, pemilik sekolah, serta orang tua dan masyarakat yang berkepentingan dalam pendidikan.

Jenis-Jenis Manajemen Perubahan Kurikulum

Menurut Soetopo dan Soemanto (1991: 39-40), perubahan kurikulum dapat bersifat sebagian atau menyeluruh.

a. Perubahan Sebagian

Perubahan ini hanya terjadi pada komponen tertentu dari kurikulum. Contohnya, perubahan dalam metode pengajaran, isi materi, atau sistem penilaian merupakan perubahan sebagian. Dalam perubahan jenis ini, modifikasi pada satu komponen mungkin tidak mempengaruhi komponen lainnya. Sebagai contoh, penambahan satu atau lebih mata pelajaran ke dalam kurikulum bisa saja terjadi tanpa mengubah metode pengajaran atau sistem penilaiannya.

b. Perubahan Menyeluruh

Selain perubahan sebagian, perubahan kurikulum juga bisa bersifat menyeluruh, di mana seluruh sistem kurikulum mengalami perubahan. Ini mencakup perubahan pada tujuan, isi, organisasi, strategi, dan pelaksanaannya. Misalnya, perubahan dari Kurikulum 1968 ke Kurikulum 1975 dan 1976 merupakan contoh perubahan kurikulum yang menyeluruh. Demikian juga dengan pengembangan kurikulum sekolah pembangunan yang mencerminkan usaha perubahan kurikulum secara menyeluruh. Kurikulum 1975 dan 1976, misalnya, mengalami pengembangan dalam tujuan, isi, organisasi, dan strategi pelaksanaannya yang baru dan berbeda dari kurikulum sebelumnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum

Menurut Soetopo dan Soemanto (1991: 40-41), terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum di berbagai negara saat ini:

1. Kemerdekaan sejumlah wilayah dari kekuasaan kolonialis. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa sistem pendidikan yang diterapkan selama ini tidak lagi sesuai dengan cita-cita nasional mereka yang merdeka. Akibatnya, mereka mulai merencanakan perubahan signifikan dalam kurikulum dan sistem pendidikan mereka.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. Di satu sisi, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan teori-teori baru yang menggantikan teori-teori lama. Di sisi lain, perkembangan dalam ilmu psikologi, komunikasi, dan bidang lainnya memunculkan teori dan metode baru dalam proses belajar mengajar. Kedua perkembangan ini secara otomatis mendorong perubahan dalam isi dan strategi pelaksanaan kurikulum.
3. Pertumbuhan pesat populasi dunia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan perlunya peninjauan kembali dan, jika perlu, perubahan dalam cara atau pendekatan pendidikan yang digunakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin besar.

Ketiga faktor di atas secara umum banyak mempengaruhi perubahan kurikulum yang terjadi saat ini. Perkembangan kurikulum bersifat seperti spiral, bukan lingkaran, sehingga kita tidak kembali ke yang lama, tetapi mencapai titik yang lebih tinggi dari yang lama.

Sejarah Perkembangan Manajemen Perubahan Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik negara. Negara-negara penjajah yang menduduki Indonesia juga memengaruhi sistem pendidikan di sini. Sistem pendidikan Belanda, misalnya, diatur dengan prosedur yang ketat, mencakup aturan untuk siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Prosedur ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Selain itu, sistem pendidikan Belanda bersifat diskriminatif, membedakan pendidikan untuk anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi juga dibagi lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan Priyayi (Sanjaya, 2008: 207).

Sekolah untuk anak-anak pribumi golongan non priayi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, dikenal sebagai Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang lulus bisa melanjutkan ke Sekolah Sambungan (Vervolg School) selama 2 tahun, dan kemudian ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, yang merupakan pendidikan tertinggi bagi pribumi biasa. Golongan pribumi bangsawan bisa masuk His Inlandsche School selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan Algemene Middlebare School (AMS) selama 3 tahun.

Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi 12 kali perubahan kurikulum selama 70 tahun. Pada masa Orde Lama (Orla) atau masa pemerintahan Presiden Soekarno, terjadi 3 kali perubahan kurikulum: Rencana Pelajaran tahun 1947, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar tahun 1964, dan Kurikulum Sekolah Dasar tahun 1968. Pada masa Orde Baru (Orba) atau masa pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi 6 kali perubahan kurikulum: Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973, Kurikulum SD tahun 1975, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Revisi Kurikulum 1994 pada tahun 1997. Setelah masa Orba berakhir dan

dimulainya masa reformasi, terjadi 3 kali perubahan kurikulum: Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, dan terakhir Kurikulum 2013.

Dilihat dari lamanya waktu berlaku, Rencana Pelajaran tahun 1947 adalah kurikulum terlama pada masa pasca kemerdekaan atau era Orla, berlaku selama 17 tahun. Pada masa Orde Baru, Kurikulum 1984 bertahan paling lama, yaitu 10 tahun. Kurikulum KTSP adalah yang terlama pada masa reformasi, berlaku selama 7 tahun. Sebaliknya, Rencana Sekolah Dasar adalah kurikulum dengan masa berlaku terpendek sepanjang masa Orla, hanya 4 tahun. Pada masa Orba, Kurikulum PSPP berlaku hanya 3 tahun. Rintisan KBK adalah kurikulum dengan masa berlaku tersingkat sepanjang era reformasi dan sejarah republik ini, hanya 2 tahun. Saat ini, Kurikulum 2013 (K13) adalah kurikulum yang diterapkan. Uhbiyati (2008: 46) menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, ada beberapa periode pemberlakuan kurikulum: kurikulum sederhana (1947-1964), pembaruan kurikulum (1968-1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984-1999), kurikulum berbasis kompetensi (2004-2006), dan yang terakhir kurikulum dengan pendekatan saintifik yaitu Kurikulum 2013.

1. Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum pertama yang lahir setelah kemerdekaan menggunakan istilah "*leer plan*" dalam bahasa Belanda, yang berarti rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer daripada "*curriculum*" dalam bahasa Inggris. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis, yaitu dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan yang digunakan adalah Pancasila. Pada awalnya, kurikulum tahun 1947 ini diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena situasi politik yang tidak stabil akibat perang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Baru pada tahun 1950, kurikulum ini mulai dilaksanakan secara luas.

Kurikulum tahun 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia merdeka yang sejati dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Perubahan kurikulum tahun 1947 tersebut lebih menyangkut pada penggantian orientasi pendidikan kolonial ke orientasi pendidikan nasional. Materi pelajaran terdiri atas: Bahasa Indonesia, *Civics*, Pengetahuan Alam, Aljabar dan Berhitung, Menggambar, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Keterampilan, Ilmu Hayat, Sejarah, Geografi, Menyanyi dan Pendidikan Jasmani.

2. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Setiap mata pelajaran dirinci sesuai dengan kelas masing-masing. Pada kurikulum ini, setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, setiap mata pelajaran harus memberikan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari siswa. Pokok-pokok yang diajarkan ditentukan dalam kurikulum, tetapi cara menyampaikan diserahkan kepada

guru. Guru memiliki kebebasan dalam mengajar. Mereka juga diberikan kebebasan untuk mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

3. Rencana Pendidikan 1964

Pemerintahan Orde Lama menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati berdasarkan UUD 1945. Presiden Soekarno menyatakan dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-19 tahun 1964 bahwa pemerintahannya memberi prioritas pada pendidikan yang tertuang dalam program “Pancawardhana” (lima jalur perkembangan) yaitu perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional/artistik, perkembangan keterampilan, dan perkembangan jasmani. Sekolah dasar dirancang sebagai pendidikan dasar enam tahun yang mempersiapkan siswa untuk pendidikan di sekolah lanjutan pertama. Pokok-pokok yang diajarkan meliputi: Pendidikan Moral Pancasila, Keterampilan, Matematika, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan Kerajinan, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Hayat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sesuai dengan kenyataan kehidupan. Dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah di Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, penelitian ini melibatkan kepala sekolah, tiga guru wali kelas, dan tiga siswa sebagai subjek. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi valid tentang peran wali kelas dalam mendesain ruang belajar. Data dianalisis secara sistematis menggunakan model tematik, yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi tema-tema utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan perubahan kurikulum dari K-13 ke Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli Serdang melibatkan beberapa tahapan kunci. Langkah awal adalah evaluasi menyeluruh terhadap Kurikulum 2013 (K-13) untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru-guru, kemudian mengikuti pelatihan dan *workshop* untuk memahami konsep dan penerapan Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, dilakukan pengembangan dan penyesuaian materi ajar serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) baru. Sebelum implementasi penuh, madrasah melakukan uji coba dan evaluasi awal. Proses ini juga melibatkan kolaborasi dengan komite sekolah, ahli pendidikan, serta perwakilan orang tua dan siswa untuk memastikan masukan yang beragam dan relevan.

Pelaksanaan perubahan kurikulum di madrasah ini mencakup beberapa langkah utama. Pertama, sistem Kurikulum 2013 (K-13) diganti dengan pendekatan

Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan adaptif. Pedoman baru untuk pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa dikembangkan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan diadakan bagi guru-guru untuk memastikan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan kurikulum baru. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas dan relevansi pendidikan yang diberikan.

Evaluasi perubahan kurikulum dilakukan untuk menilai berbagai aspek penting. Pertama, kesesuaian dan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka dinilai terhadap kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Evaluasi juga mengukur respons kurikulum terhadap perubahan dalam konteks sosial dan budaya. Partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh komponen sekolah dalam penerapan kurikulum dinilai, demikian juga dengan tingkat pemahaman dan kualitas pelatihan yang diterima guru. Manajemen perubahan yang dilakukan selama transisi juga dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Terakhir, evaluasi mengukur dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi siswa, dan kesiapan mereka menghadapi tantangan global. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan kurikulum memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan potensi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah.

Berdasarkan dari tinjauan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perubahan kurikulum dari K-13 ke Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah mencakup langkah-langkah kunci. Penelitian Abdillah (2021) menekankan pentingnya pelatihan intensif bagi guru, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan evaluasi berkelanjutan untuk keberhasilan transisi. Studi Firdaus dan Purwanto (2020) menekankan perlunya dukungan sistem, seperti pengembangan profesional guru, untuk mendukung perubahan kurikulum yang efektif. Sementara itu, penelitian Sari dan Setiawan (2019) menyoroti pentingnya komunikasi yang baik, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan resistensi untuk memastikan transisi kurikulum berjalan mulus. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang praktik terbaik dalam proses perubahan kurikulum yang komprehensif dan efektif, seperti yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah.

KESIMPULAN

1. Perubahan kurikulum dari K-13 ke Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hikmah Kecamatan Beringin Deli Serdang melibatkan beberapa tahap penting. Tahapan awal identifikasi kebutuhan dimulai dengan evaluasi terhadap Kurikulum 2013 (K-13) yang telah diterapkan. Proses perencanaan dan desain Kurikulum Merdeka melibatkan seluruh staf pengajar, tim kurikulum, dan kepala sekolah. Langkah konkret yang diambil meliputi revisi silabus dan materi pembelajaran sesuai dengan panduan

Kurikulum Merdeka yang baru. Proses validasi dan uji coba awal dilakukan sebelum diterapkan secara luas di madrasah ini.

2. Pelaksanaan perubahan kurikulum dari K-13 ke Kurikulum Merdeka melibatkan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, pengembangan pedoman implementasi baru, pelatihan bagi pendidik, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan relevansi pendidikan yang diselenggarakan. Evaluasi perubahan kurikulum ini mencakup beberapa aspek kunci, seperti relevansi kurikulum terhadap kebutuhan lokal dan karakteristik siswa, responsivitas terhadap perubahan dalam konteks sosial dan budaya, serta partisipasi serta dukungan aktif dari sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Evaluasi akhirnya bertujuan untuk mengukur dampak positif yang diharapkan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi siswa, dan kesiapan mereka menghadapi tantangan global di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2014). Problematika kurikulum 2013 dan kepemimpinan instruksional kepala sekolah. *Jurnal pencerahan*, 8(2).
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>
- Apriliani Zahra Rosyiddin, A., Cynthia Johan, R., Mulyadi Inovasi Pembelajaran Sebagai Upaya, D., & Mulyadi, D. (n.d.). Inovasi Pembelajaran Sebagai Upaya Menyelesaikan Problematika Pendidikan Indonesia.
- Aprima, D., & Sari, S.-. (2022). 2960-Article Text-9462-2-10-20220917. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(1), 1–7.
- Chaerani, N. I. P., Rosmana, P. S., Iskandar, S., Putri, D. O., Rahman, M. C., & Hasanah, N. W. (2022). Pengaruh Pengembangan Kurikulum Terhadap Prestasi Siswa. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 20(1), 12-27.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Ghozali, I. (2017). Pendekatan scientific learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. *Jurnal Pedagogik*, 04(01).
- Hadna, N. M. S., Santosa, P. I., & Winarno, W. W. (2016). *Studi literatur tentang perbandingan metode untuk proses analisis sentimen di Twitter*. *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun*, 2016, 57-64.
- Hariko, R. (2016). Ilmu Bimbingan dan Konseling, Nilai dan Kesejahteraan Individu: Studi Literatur. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 4(2), 118-123. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JI>
- Inayati, U. (2022). 96. *International Conference on Islamic Education*, 2(1), 1–12.
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011-3024.
- Mabruri kamaluddin, zuniar. (2021). 352721- tinjauan-kurikulum-darurat-dalam-kondisi-8ab105a7. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2), 1–9.
- Machali, I. (2014). Kebijakan perubahan kurikulum 2013 dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71-94.
- Manik, H., Sihite, A. C. B., Sianturi, F., Panjaitan, S., & Hutauruk, A. J. B. (2022). *Tantangan Menjadi Guru Matematika Dengan Kurikulum Merdeka Belajar Di Masa Pandemi Omicron Covid-19* (Vol. 6, Issue 1).
- Mar'ah, N. K., Rusilowati, A., & Sumarni, W. (2020). *Perubahan proses pembelajaran daring pada siswa Sekolah Dasar di tengah pandemi Covid-19*. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)* (Vol. 3, No. 1, pp. 445-452).
- Martin, R., & Simanjourang, M. M. (2022). *Pentingnya Peranan Kurikulum yang Sesuai dalam Pendidikan di Indonesia*. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1(1), 125-134.

- Muhammedi, M. (2016). Perubahan Kurikulum Di Indonesia: Studi kritis tentang upaya menemukan Kurikulum Pendidikan islam yang ideal. *Jurnal Raudhah*, 4(1).
- Nafindra, I. B., & Rifqi, A. *Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah*.
- Novianto, A., & Mustadi, A. (2015). 7181- 18400-2-PB. *JURNAL KEPENDIDIKAN*, 45(1), 1-15.
- Nugroho, T., & Narawaty, D. (2022). *Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Prototipe (2020- 2021) Atau Kurikulum Merdeka (2022) Mata Pelajaran Bahasa Inggris: Suatu Kajian Bandingan*. In SINASTRA: Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Seni, dan Sastra (Vol. 1, pp. 373-382).
- Nurdiansyah, L., Maulana, M. A., & Fauzan, S. (2022, July). *Hubungan Kebijakan Perubahan Kurikulum Merdeka Terhadap Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Dalam Mata Kuliah Komputer Akuntansi*. In Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) (Vol. 2, No. 3).
- Nurwiatin, N. (2022). Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Dan Kesiapan Kepala Sekolah Terhadap Penyesuaian Pembelajaran Di Sekolah. *Edsuintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 9(2), 472-487.
- Pitasari, N. A. A., & Perdhana, M. S. (2018). Kepuasan kerja karyawan: Studi literatur. *Diponegoro Journal of Management*, 7(4), 605-612.
- Pranoto, B. E., & Suprayogi, S. (2020). A Need Analysis of ESP for Physical Education Students in Indonesia. *Premise: Journal of English Education*, 9(1), 94-110.